

## **BAB II**

### **Hegemoni Dan Perkembangan Korporatisme**

#### **Group Bakrie di Indonesia**

Dalam analisis Gramsci, ideologi lah yang memajukan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif. Maka, ketika berbicara mengenai hegemoni, kepemilikan modal merupakan syarat konstitutif yang inheren dalam praktek hegemonisasi. Kepemilikan modal yang dikendarai oleh Globalisasi, menyangkut tataran tindakan; tata kekuasaan global bertumpu pada praktek bisnis raksasa lintas negara. Pelaku utamanya adalah perusahaan-persusahaan transnasional, melalui proses ideologisasi pasar liberal sebagai mediumnya. Keberadaan perusahaan transnasional ini bersaing dengan beberapa kelompok konglomerat pribumi yang relatif punya kekuatan modal.

Dalam pengertian Gramsci, kapitalisme berarti juga hegemoni dalam wujud pelaksanaan politik yang tampil dalam upaya penguasaan intelektual dan moral dengan melibatkan cara-cara kultural dan intelektual yang canggih untuk melumpuhkan kesadaran kritis pihak yang dikuasai, maka melalui dominasi pasar dan sumber daya yang menguntungkan koroprasi tanpa sadar seringkali menjadi bentuk hegemoni baru yang berdampak pada keseharian hidup manusia.

#### **A. Sejarah Group Bakrie**

Untuk sampai berkembang sebesar sekarang ini, Bakrie Group memulai usahanya dari titik nol. Pada tanggal 10 Februari 1942, Achmad Bakrie bersama kakak kandungnya H. Abu Yamin mendirikan "Bakrie & Brothers" general Merchant and Comision Agent. Perusahaan dagang di Teluk Batang inilah yang

menjadi cikal bakal kelompok usaha Bakrie. Perusahaan ini bergerak dibidang perdagangan karet, lada, kopi dan selama perjalan usahanya sempat mengubah nama menjadi Jusuma Shokai pada masa kependudukan Jepang karena dianggap terlalu kebarat-baratan. Namun pada tahun 1943; perusahaan ini dipindahkan ke Jakarta dan mengganti nama ke semula.

Pada tahun 1952, perusahaan ini berkembang hingga mencapai luar negeri dan tidak hanya dalam lingkup perdagangan dan perkebunan tetapi juga meluas ke wilayah industri manufaktur hingga sukses dan berkembang dengan pesat. Pada tanggal 15 Februari 1988, Ahmad Bakrie meninggal dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Aburizal Bakrie; Roosmania Odi Bakrie; Indra Usmansyah; dan yang terakhir adalah Nirwan Dermawan Bakrie.<sup>46</sup>

Kebesaran kelompok usaha Bakrie & Brothers tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Aburizal Bakrie, pengusaha sekaligus politisi Indonesia. Dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie, kelompok Bakrie Group ini tumbuh dan berkembang menjadi aktor hegemonik yang berpengaruh dalam konstelasi bisnis dan politik di Indonesia. Anak sulung dari keluarga Achmad Bakrie ini pernah menjabat sebagai ketua kamar dagang dan industri (Kadin) selama dua periode (1994-2004). Selain itu, Aburizal Bakrie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Dan sejak tahun 2009, Aburizal Bakrie juga merangkap sebagai ketua umum partai Golkar.

---

<sup>46</sup><http://nursoleh02.wordpress.com/2010/02/11/h-achmad-bakrie-setiap-rupiah-yang-dihasilkan-oleh-bakrie-harus-dapat-bermanfaat-bagi-banyak-orang/> di akses pada tanggal 10 oktober

Berikut jejak riwayat karier Aburizal Bakrie di bidang politik dan bisnis<sup>47</sup>:

1. 2009-sekarang Ketua harian Sekretariat gabungan (Setgab)
2. 2009 - 2014 Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
3. 2004 - 2009 Anggota Dewan Penasehat DPP Partai GOLKAR
4. 2000 – 2005 Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
5. 1999 – 2004 Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) periode II
6. 1996 – 1998 Presiden, Asean Chamber of Commerce & Industry
7. 1996 – 1997 International Councillor, Asia Society
8. 1994 - 1999 Ketua Umum KADIN periode I
9. 1993 – 1998 Anggota, Majelis Pemusyawaratan Rakyat – periode II
10. 1993 – 1995 Anggota Dewan Penasehat, International Finance Corporation
11. 1993 – 1995 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode II
12. 1991 - 1993 Presiden ASEAN Business Forum (d/h Institute of South East Asian Business) – periode I
13. 1989 – 1994 Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia
14. 1988 – 1993 Wakil Ketua Umum, KADIN Bidang Industri dan Industri Kecil

15. 1988 - 1993 Anggota; Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) – periode I
16. 1985 – 1993 Ketua Bidang Dana PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Indonesia)
17. 1984-sekarang Anggota; Partai Golongan Karya
18. 1984 – 1988 Wakil Ketua, Asosiasi Kerjasama Bisnis Indonesia – Australia
19. 1977 – 1979 Ketua Umum; HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)
20. 1976 – 1989 Ketua Umum, Gabungan Pabrik Pipa Baja Seluruh Indonesia
21. 1975: Ketua Departemen Perdagangan HIPMI
22. 1973 – 1975 Wakil Ketua Departemen Perdagangan, HIPMI

Sebagai kelompok kepentingan yang mampu bertahan dan menjadi kekuatan hegemonik, perusahaan Bakrie masih tetap eksis berdiri dan pemiliknya Abuizal Bakrie pernah dinobatkan menjadi orang terkaya se-Asia Tenggara.

## **B. Jejaring Bisnis Bakrie**

Group Bakrie memang suatu fenomena tersendiri bagi negara kita. Kelompok usaha ini menjadi konglomerasi asal pribumi yang memiliki banyak lapangan usaha. Bahkan majalah bergengsi Internasional Forbes pernah menobatkan The big Boss Bakrie group, Aburizal Bakrie sebagai orang terkaya di Indonesia. Prestasi Aburizal Bakrie ini disebut-sebut mampu mengungguli kekuatan usaha kelompok Lim Siao Keng (Sudono Salim) Gudang Garam

Sampai tahun 2010; laporan keuangan Triwulan mencatat deposito berjangka di BACA sebesar 9,055 trilyun. Berikut rinciannya <sup>48</sup>

1. Bakrie Brothers Tbk (BNBR) senilai Rp 3,758 triliun
2. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) senilai Rp 3,504 triliun
3. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) senilai Rp 1,136 triliun
4. PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) senilai Rp 202,280 miliar
5. PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) senilai Rp 254,301 miliar
6. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) senilai Rp 9,998 miliar (US\$ 1,099 juta)
7. PT Darma Henwa Tbk (DEWA) senilai Rp 191,398 miliar

Berikut ini adalah para pemegang saham Bakrie.<sup>49</sup>

1. Nirwan Bakrie sebesar 34,35%
2. PT. bakrie investindo sebesar 21,95%
3. Aburizal bakrie sebesar 27,45%
4. Indra Usmayah bakrie sebesar 17,48%
5. Rosmania Kusmoliyono sebesar 8,74%

Unit usaha Bakrie juga melingkup banyak sektor. Jika pada awalnya kelompok Bakrie memulai dari perkebunan, sekarang unit usaha Bakrie sudah sangat luas dan merambah ke pasar internasional. Ekspansi gencar dilakukan oleh Group Bakrie sehingga berhasil membuat keluarga besar Bakrie menjadi orang-orang

---

<sup>48</sup> <http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/62173>

<sup>49</sup>

terkaya di Negara Indonesia. Berikut ini adalah unit usaha Aburizal Bakrie yang tergabung dalam " Bakrie & Brothers" dan penghasilan rata-rata mereka<sup>50</sup>:

**Tabel 2.1 Unit Usaha Bakrie & Brothres**

No	Nama Unit Usaha	Penghasilan
1	PT. Energi mega Persada	US\$ 123,6 juta
2	Bakrie telcom	US\$ 140,2 juta
3	PT. Bumi resourchies	US\$ 2,265 Milyar
4	Bakrie Sumatra Plantations	US\$ 21,8 juta
5	Bakrieland development	US\$ 85 juta
6	Bakrie Corrugated Metal Industries	US\$ 336 juta
7	Bakrie Infrastruktur	US\$

### **C. Relasi Bisnis Bakrie Grup dengan Negara**

Besarnya usaha yang di koordinatori oleh Aburizal Bakrie ini bukan berarti tanpa halangan. Sebagai seorang korporat yang memiliki banyak unit usaha, ditambah dengan track record sebagai politisi senior, perkembangan bisnis Aburizal Bakrie dan kelompok usahanya adalah potret praktek hegemoni di Indonesia:

Dalam logika neo-liberalisme, peran Negara dibutuhkan sebagai ' juru kunci' untuk memuluskan usaha para pemilik modal. Begitu juga kelompok kepentingan (pengusaha) membutuhkan peran negara untuk memuluskan aspirasi

<sup>50</sup> Lihat Laporan Utama Regulasi dan Politik Bakrie Majalah Tempo 5 Juli 2014, hal. 21-22. <http://www.tempoonline.com/2014/07/05/bakrie-ke-keadilan-ekonomi/>

kepentingan mereka. Seperti dibahas pada teori kepentingan di BAB sebelumnya, Rod Hague & Martin Harrop mengatakan, bahwa kelompok kepentingan akan terus mengartikulasikan kepentingannya sampai kepentingan tersebut berhasil dicapai: Bentuk artikulasi kepentingan paling umum dalam sistem politik adalah pengajuan permohonan kepada anggota parlemen, pejabat pemerintah atau pembuat kebijakan lainnya.

Begitu pun dengan keberadaan kelompok Usaha Group Bakrie. Sebelum tersandung kasus semburan Lumpur Lapindo, kelompok usaha Group Bakrie ini pernah mengalami pasang surut termasuk saat krisis moneter yang mengguncang finansial global. Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada dua kali penyelamatan usaha besar-besaran yang dilakukan oleh negara untuk menyelamatkan aset Bakrie saat terjadi krisis, niat baik negara ini tidak bisa dilepaskan dari praktek hegemoni dan pengaruh politis Aburizal Bakrie dengan melakukan lobi dengan pemerintah. Proses lobi yang kerap berjalan lancar dengan pemerintah ini adalah karakteristik Group Bakrie, sehingga Group Bakrie dikenal bukan hanya sebagai kelompok dagang saja. Tetapi lebih dari pada itu, yaitu kelompok kepentingan hegemonik. Fakta ini menunjukkan Aburizal Bakrie mampu melakukan monopoli kekuasaan untuk menyelamatkan kepentingan bisnisnya. Berikut ini adalah beberapa catatan kasus yang menyeret perusahaan Bakrie Group dan selanjutnya dengan pemerintah.

### **C.1 Krisis Finansial tahun 2008**

Pertama krisis Moneter melanda Asia tahun 2008, saat anak usaha Bakrie mengalami penurunan saham yang anjlok di pasaran. Kondisi anjloknya pasar modal pada tahun 2008 yang lalu membawa dampak buruk bagi keuangan group Bakrie. Dengan kondisi terjepit hutang, pada tahun 2008 yang lalu adik kandung Aburizal Bakrie menggunakan koneksi politik untuk mengatasi keuangan mereka. Aburizal Bakrie yang pada waktu itu menjabat menteri koordinator kesejahteraan rakyat bersama dengan adiknya yaitu Nirwan menemui wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil Jusuf Kalla.

Pasca pertemuan tersebut, mencuat wacana bahwa Group Bakrie mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengumpulkan dana sebanyak US\$ 1,2 Milyar. Usulan tersebut pada awalnya direspon oleh kamar dagang dan industri ketika mengadakan rapat paripurna. Namun usulan ini mendapat tentangan dari menteri keuangan pada saat itu yakni Sri Mulyani. Pada pekan yang sama, salah satu anggota konsorsium yaitu Northan Pacific dengan dimotori oleh Patric Walujo membeli saham anak usaha Bakrie guna membantu kondisi pasar modal Bakrie yang sedang anjlok. Mereka ini adalah tim sukses SBY pada kampanye pemilihan Presiden pada tahun 2004.<sup>51</sup>

Usaha 'balas budi' yang dilakukan pemerintah kepada Aburizal Bakrie dikarenakan sumbangan yang telah diberikan Aburizal bakrie kepada pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla pada saat kampanye Presiden tahun 2004. Sumbangan dari pengusaha Bakrie ini membuat demokrat leluasa bergerak



sehingga bisa membuat tim sukses mampu menyewa jasa iklan dan membayar tayangan di Televisi. Namun masalah pendanaan kampanye ini disangkal oleh juru bicara Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa. Menurut Sumber, saat itu Abu Rizal Bakrie tidak bisa secara terang-terangan melakukan dukungan karena sebagai kader Golkar, seharusnya dia mendukung Wiranto-Shalahudin Wahid, calon dari partai Golkar.<sup>52</sup>

Sesungguhnya tindakan pemerintah yang sudah mempengaruhi pasar modal merupakan tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8/1995. Adapun menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8/1995 tidak mengizinkan intervensi oleh pejabat pemerintah. Undang-Undang itu, khususnya Pasal 3, jelas menyatakan: pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).<sup>53</sup> kebaikan pemerintah ini tidak lepas dari alasan sumbangan dana kampanye yang diberikan pemilik Bakrie group tersebut pada waktu kampanye pemilu presiden 2004.

## **6.2 Kasus Tender Jaringan SLI oleh Bakrie Telkom tahun 2007**

Pada tanggal 29 Juni 2007 yang lalu, departemen komunikasi mengadakan seleksi untuk pemegang lisensi sambungan langsung internasional (SLI). Tender ini pada mulanya diikuti oleh empat peserta, yaitu Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL), Telepon seluler (NTS) dan PT Mobile 8 telecom.

<sup>52</sup> Sumber diambil dari artikel "Benci-Rindu Dua Seteru" dari Majalah Tempo, edisi 22-28 Februari 2010

<sup>53</sup> 2 desember 2008, Jawaban Tempo atas pengaduan bakrie ke Dewan Pers diambil dari ([http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2008/12/03/03\\_00081203\\_312\\_1111...](http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2008/12/03/03_00081203_312_1111...))

Pada tanggal 23 Agustus 2007, dengan alasan tidak sanggup maka PT Mobile 8 telecom mengundurkan diri sehingga tender hanya diikuti oleh tiga peserta. Ketiga peserta ini mengikuti tahap kualifikasi. Pengumuman pemegang tender tidak dilakukan pada tanggal 12 September 2007 sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia tetapi mundur menjadi tanggal 17 September 2007. Maka, berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No 415/KEP/Kominfo/9/2007, pihak Bakrie telecom milik Menko kesra Abu Rizal Bakrie (pada saat Bakrie menjabat menko kesra) dinyatakan sebagai pemenang.<sup>54</sup>

Bakrie telecom berhasil mengalahkan pesaingnya PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) dalam perebutan lisensi ini. Kemenangan ini diungkapkan Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar selaku ketua panitia seleksi dalam jumpa pers pengumuman pemenang di Gedung Sapta Pesona, Jakarta;

Dalam tender SLI, peserta tender diberikan persyaratan untuk menyanggupi pembangunan dua sentral gerbang internasional (SGI) di barat dan timur Indonesia. Dua SGI tersebut nantinya harus dihubungkan hingga ke titik utama jaringan tulang punggung internasional. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar selaku ketua panitia seleksi mengatakan, dengan dipilihnya Bakrie Telecom maka Bakrie harus memenuhi komitmen pembangunan dalam lima tahun pertama. Hal ini melingkupi 5 SGI di Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar, dan Medan. Di samping itu Bakrie juga harus membuat satu *landing point* di Batam, rute jaringan internasional (yang direncanakan menuju Singapura), pembangunan

---

<sup>54</sup> Lihat Forum Utama, "Dugaan Kolusi Bakrie di tender SLI", di majalah Forum No 32/10-16 Desember 2007 Hal 12-13

jaringan Internet Exchange (IIX) melalui serat optik; serta penyediaan jaringan transmisi antar SGI. Bakrie Telecom telah menyatakan kesanggupan untuk mengalokasikan dana sebesar US\$ 20 juta dari belanja modalnya (capital expenditure) di 2008 untuk pembangunan jaringan infrastruktur SLI. Sedangkan untuk layanan SLI, sebelumnya Bakrie menjual layanan yang disalurkan melalui percakapan berbasis internet melalui lisensi Internet Telepon untuk Keperluan Publik (ITKP).<sup>55</sup>

Kemenangan Bakrie telecom ini kemudian mencuatkan adanya rumor kolusi terkait keganjilan kemenangan Bakrie telecom. Pada proposal penyelenggaraan SLI tersebut mensyaratkan ketersediaan jaringan; infrastruktur; dan modal. Berdasarkan ketersediaan jaringan, XL adalah satu-satunya peserta yang siap dengan jaringan SLI. Lain halnya dengan Bakrie telecom yang belum memiliki ketersediaan jaringan.

Kemenangan Bakrie Telecom ini pada awalnya diprotes oleh pihak XL. Namun protes ini tidak ditanggapi. Pertanyaan besar kemudian mencuat di publik. *Mengapa Bakrie Telecom yang tidak memiliki kesiapan jaringan, infrastruktur dan modal justru dipaksakan sebagai pemenang? Bagaimana mungkin XL yang sudah menanamkan investasi 20 juta dolar untuk membangun jaringan SLI bisa dikalahkan?*

Berdasarkan penelusuran majalah Forum, Kemenangan PT Bakrie telecome dalam tender sambungan langsung Internasional (SLI) disebut-sebut

---

<sup>55</sup>17 September 2007, Achmad Rouzni noor, *Bakrie Telcom menang tender SLI*, ([http://www.detikinet.com/read/2007/09/17/162714/821047/278/bakrie\\_telcom\\_menang](http://www.detikinet.com/read/2007/09/17/162714/821047/278/bakrie_telcom_menang)

bukan karena perusahaan milik Menkokesra layak secara teknis dan finansial; melainkan tidak lebih dari faktor kekuasaan. Pengunduran waktu pengumuman juga bukan tanpa sebab karena dibalik itu, ada pertarungan kepentingan ekonomi politik yang menyertainya. Termasuk campur tangan Menkokesra saat itu, yaitu Aburizal Bakrie.<sup>56</sup>

Permasalahan lain yang mengemuka adalah soal keterlibatan panitia tender yang masih terikat secara kerabat dengan peserta tender, termasuk Bakrie telecome. Hal ini diakui oleh Luhut MP Pangaribuan seorang pengajar di fakultas hukum UI yang menyatakan bahwa Bakrie telecome tidak memiliki pengalaman di bidang penyediaan layanan SLI dan secara teknis juga jauh dibawah XL.<sup>57</sup>

Dengan keberadaan Bakrie yang berada dalam Kabinet pemerintahan, Bakrie berhasil dalam seleksi tender sambungan langsung internasional (SLI). Sebagai akibatnya, pihak XL dirugikan karena diduga pemerintah tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai seleksi tender ini.<sup>58</sup>

### **6.3 Kasus Tunggakan Royalti Batubara tahun 2008 dan Pajak 2010**

Pada bulan tahun 2008, Menteri keuangan saat itu, Sri Mulyani mengungkapkan adanya kasus tunggakan royalti batubara yang mencapai 7 trilyun atau hampir 16 Trilyun. Tunggakan ini berasal dari perusahaan group Bakrie yaitu Adaro, Kaltim Prima coal, Arutmin Berau Coal dan Kideco. Akibatnya Sri Mulyani melakukan pencekalan. Dua bulan berikutnya, status cekal

---

<sup>56</sup> Lihat di forum Majalah Forum nomor 32/10-16 desember 2007 hal 14

<sup>57</sup> Majalah Forum nomor 32/10-16 Desember 2007

<sup>58</sup> 17 Desember 2008, "Bakrie akhirnya lelah menjadi menteri dan pengusaha" (<http://nusantaranews.wordpress.com/2008/12/17/sepak-terjang-bakrie-menteri-pengusaha-dan-estetas-bitam-mundial/>)

tersebut dicabut kembali karena Group Bakrie sudah menyetorkan uang jaminan sebesar 600 milyar ke rekening pemerintah.

Kasus pengemplangan pajak ini menjadi pemicu ketegangan hubungan Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani (mantan menteri keuangan). Sri Mulyani pada waktu itu sangat bersikeras untuk menelisik tunggakan pajak tiga perusahaan Bakrie, PT Bumi Resources, Arutmin Indonesia, dan Kaltim Prima Coal. Konflik keduanya kemudian mengemuka kembali saat Golkar menjadi bagian pansus Century. Dodi Ambardi, Direktur Eksekutif lembaga Survey Indonesia menilai, ada deal politik di balik mundurnya Sri Mulyani dari jabatan menteri Keuangan dan kembalinya Golkar ke koalisi pemerintah setelah bersiteru dalam penilaian kebijakan penalangan bank century dan diangkatnya Aburizal Bakrie menjadi ketua harian Sekretariat gabungan.<sup>59</sup>

Permasalahan pengemplangan pajak mulai mengemuka sekarang (Mei 2010) yang merupakan rangkaian dari belitan masalah keuangan group Bakrie. Dugaan praktek penggelapan pajak ini melibatkan dirjen perpajakan yang di kemudian hari mencuatkan nama Gayus sebagai mafia pajak. Kasus ini kembali menyeret nama perusahaan Bakrie karena konspirasi politik di dalamnya.

Menurut Gayus, praktek penggelapan pajak Group Bakrie ini dilakukan untuk tiga perusahaan Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, Dan PT Bumi Resources. Sebagai imbalannya, Gayus mendapatkan US\$ 3 juta:

<sup>59</sup> Lihat Kalam Dodi Ambardi, "Konflik Dengan Laki-Laki", 5/1/2010, <http://www.kompas.com>

Pengakuan sepihak Gayus ini akan diklarifikasi segera oleh Badan reserse kriminal kepada pihak perusahaan yang dimaksud. Merespon permasalahan ini, group Bakrie melakukan bantahan keras. Lalu Maria Satria Wangsa mengatakan apa yang ditudingkan hanya berupa tudingan yang diarahkan untuk menjatuhkan citra Aburizal Bakrie. Menurut juru bicara keluarga Bakrie ini, Abu Rizal Bakrie sudah tidak bisa dikaitkan dengan perusahaan, karena kesehariannya sudah mengurus urusan politik.<sup>60</sup>

Terungkapnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan, selain menyeret pihak Bakrie sebagai tersangka, semakin menyadarkan publik bahwasanya ada banyak sekali kasus persekongkolan yang terjadi diantara aparat pajak dan wajib pajak ataupun antara aparat pajak, wajib pajak dan pengadilan pajak.

#### **C.4. Kasus Lapindo 2006-sekarang**

Sudah 4 tahun sejak 26 Mei 2006, namun kasus Lapindo belum menemukan titik cerahnya. Sampai sekarang, lumpur lapindo masih aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap hari. Hal ini telah mengakibatkan kelumpuhan bagi 19 desa dari 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggul Angin. 14.000 keluarga kehilangan kehidupan normal mereka; 33 sekolah tenggelam dan enam pesantren tutup. Korban meninggal akibat ledakan gas pertamina sebanyak 15 orang.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dari hasil Wawancara Lula Maria Satria dengan pihak Gatra, dimuat di kolom Laporan Khusus "Kalau dia menuduh, Buktikan donk", Gatra No 31 tahun XVI, 10-16 Juni 2010

<sup>61</sup> <http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/30/bakrie-award-2010-ditolak-dua-nominatornya/>

Mengacu pada peraturan presiden Nomor 14 tahun 2007, Lapindo sejatinya hanya mengganti tanah dan bangunan serta biaya yang dianggap darurat. Ketika itu, Keluarga Bakrie sebagai keluarga terkaya se-Asia tenggara versi majalah Globe Asia pada tahun 2008. Semua ini berkat melambungannya harga batu bara dunia yang membuat saham produsen batu bara melejit samapi 600 persen. namun meskipun begitu, semburan lapindo telah membuat usaha kelompok Bakrie mengalami kesulitan:

Sejak payung hukum penanganan lumpur lapindo ditekan, memang Group Bakrie mulai melakukan pembayaran ganti rugi, tetapi tidak sepenuhnya lancar. Pembayaran uang muka 20% terlambat, pihak PT Lapindo Brantas gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan Presiden pada waktu itu yaitu tanggal 14 September 2007. Menanggapi masalah ini, ekonom Hendri Saparini berpendapat, terkatung-katungnya masalah pembayaran adalah dikarenakan pemerintah tidak mampu menekan Group Bakrie. Pengamat ekonom ini menilai, pemerintah seharusnya sejak dulu menyita aset group Bakrie sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan sebagai jaminan penyelesaian.<sup>62</sup>

Berlarut-larutnya pembayaran ganti rugi dan semakin maraknya aksi demonstrasi massa korban Lapindo membuat Presiden Susilo Bambang Yudiyono memanggil Nirwan Dermawan Bakrie selaku penanggung jawab kelompok usaha Bakrie sekaligus Pemimpin Eksekutif Lapindo Brantas ke istana. Namun pertemuan pertama ini belum membawa dampak signifikan. Aksi demonstrasi semakin menjadi-jadi. Puncaknya adalah dengan adanya hampir 1034 korban

<sup>62</sup> Lihatlah, misalnya, "Gubernur Jawa Tengah: Pemerintah Harus Menekan Bakrie," *Kompas.com*, 23 Desember 2009.

Lapindo yang berunjuk rasa dan menginap di Masjid Istiqlal. Unjuk rasa ini dilakukan para korban untuk menuntut penyelesaian ganti rugi. Panggilan kedua dilakukan SBY kepada Nirwan Dermawan Bakrie. Pada pertemuan kedua ini, Lapindo berjanji membayar sisa ganti rugi 80% dengan cara mencicil Rp 30 juta per bulan.

Kesepakatan yang dihasilkan ini tidak lantas membuat masalah selesai. Ada penolakan dari kelompok yang menghendaki pembayaran ganti rugi secara tunai, tidak dengan angsuran. Ini terjadi karena para korban memang terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah pendukung pembayaran tunai 20% uang muka dan sisanya 80%. Kelompok kedua adalah pendukung *cash and resettlement*, yakni pemberian uang muka 20% dan sisanya 80% dalam bentuk lahan seluas tanah warga yang terkena lumpur. Kelompok ketiga adalah warga pendukung pola pembayaran relokasi plus yaitu 20% uang tunai dan sementara sisanya 80% berupa lahan plus rumah yang dipilih oleh Lapindo.

Sampai tanggal 3 Desember 2008, Lapindo sudah membayar uang muka sebesar 20% sebanyak 12.865 berkas sertifikat senilai Rp 718 Milyar. Adapun sisa ganti 80% secara tunai sebanyak 1768 berkas senilai Rp 344 Milyar dan 2938 berkas secara *cash and resettlement* senilai Rp 1,6 Trilyun.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid hal 104



Berikut kronologis rigid kondisi Bakrie pasca tragedi lumpur<sup>64</sup>.

**Tabel 2.2 Tabel Kronologis Tragedi Lapindo**

<b>Waktu</b>	<b>Keterangan peristiwa/ Jumlah asset Bakrie</b>
29 mei 2006	Lumpur panas menyembur di area sumur eksplorasi minyak/gas PT Lapindo brantas, Sidoarjo
21 juni 2006	Pihak lapindo mengakui telah menyediakan dana sekitar 665 Milyar
Agustus 2006	Lapindo memberikan uang sewa rumah 2,5 juta setahun per-keluarga selama dua tahun kpd korban
8 September 2006	Presiden membentuk tim nasional penanggulangan semburan Lumpur Sidoarjo
Desember 2006	Kekayaan keluarga Bakrie ditaksir senilai 11,04 trilyun dan menempatkan keluarga ini menjadi peringkat ke-6 keluarga terkaya di indonesia
8 maret 2007	Lapindo menyatakan telah menghabiskan Rp1,3 trilyun utk penanganan semburan dan dampak sosial lumpur Sidoarjo Pemerintah memperbaharui peta bencana dengan memasukkan tiga daerah baru.

<p>22 maret 2007</p>	<p>Pemerintah memperbaharui peta bencana dan memasukkan tiga daerah baru</p>
<p>8 April 2007</p>	<p>Turun Peraturan presiden tentang badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo sbg pengganti Tim Nasionak Penanggulangan Semburan lumpur Sidoarjo. Mengacu pd peraturan ini, kewajiban lapindo sebesar 3,4 trilyun</p>
<p>26 Juni 2007</p>	<p>Presiden meminta lapindo mempercepat pembayaran 20% uang muka utuk sepuluhribu kepala keluarga mulai 1 juli 2007, selama sepuluh minggu berturut-turut.</p>
<p>14 September 2007</p>	<p>Tenggat pembayaran uang muka 20% habis, lapindo gagal memenuhi permintaan Presiden.</p>
<p>Desember 2007</p>	<p>Berkat kenaikan harga batubara, nilai saham Bumi resources melejit dan mendongkrak kekayaan keluarga Bakrie menjadi 50 Trilyun. Pd tahun ini, keluarga bakrie menjadi keluarga terkaya di Indonesia.</p>
<p>28 Mei 2008</p>	<p>Tenggat lapindo untuk mulai membayar sisa 80% tunai. Pembayaran pertama dilakukan lapindo kpd 11 warga Siring senilai Rp 2,054 Milyar</p>

<p>11 Juni 2008</p>	<p>Presiden menerbitkan Peraturan Presiden yg merivisi Perpres No.14 thn 2007. 3 Desa kedungcangkring, Pejarakan&amp; besuki dimasukan ke peta benacana, namun pembiayaan ditanggung oleh negara.</p>
<p>23 oktober 2008</p>	<p>PT. Minarak lapindo Jaya mengirimkan surat ke ketua Dewan pengarah BPLS Djoko Kirmanto meminta pemerintah menaggulangi biaya penanggulangan lumpur.</p>
<p>3 november 2008</p>	<p>Minarak mencabut surat 23 Oktober</p>
<p>11 November 2008</p>	<p>Lapindo mengaku telah mengeluarkan dana pembelian tanah/bangunan warga sekitar 1,8 Trilyun. Menurut Ketua Paguyuban Renokenongo Sunarto, masih ada 465 berkas yg belum dibayar.</p>
<p>27 November 2008</p>	<p>Presiden memanggil Nirwan dan mendesak Lapindo melunasi uang muka 20 % ganti rugi sebesar 49 Milyar</p>
<p>30 November 2008</p>	<p>Serbuan warga Korban lapindo ke jakarta</p>
<p>1 desember 2008</p>	<p>Lapindo gagal menepati tenggat yang diminta oleh Presiden</p>

3 desember 2008	Presiden kembali memanggil Nirwan
-----------------	-----------------------------------

Kasus Semburan lumpur yang terjadi pada tanggal 26 mei membawa dampak yang besar bagi group Bakrie. Ketika periode kabinet SBY jilid I kasus lumpur lapindo ini sempat memicu konflik dan membuat peran Aburizal Bakrie sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat pada waktu itu tidak bisa dibedakan dengan pengusaha konglomerasi bisnis. Hal ini terlihat dari kritikan Aburizal Bakrie di gedung menteri koordinator kesejahteraan rakyat dan di kantor kepresidenan kepada ketua badan pengawas pasar modal (Bapepam), Ahmad Fuad Rahmani mengenai penjualan lapindo unit bisnis milik group Bakrie kepada Freehold ltd:

Bakrie menghendaki pemisahan lapindo dari PT Energi persada salah satu perusahaan andalan group tersebut. Namun hal tersebut ditolak oleh Bapepam. Bakrie kemudian mengambil jalan menjual saham induk lapindo kepada Freehold group. Persetujuan Aburizal Bakrie dengan Bapepam yang di dukung oleh menteri keuangan Sri Mulyani saat itu, merupakan cikal bakal dari usaha Aburizal Bakrie untuk menyelamatkan citra grop Bakrie secara keseluruhan

Untuk keluar dari masalah lapindo yang menjerat ini, selain dengan menggunakan kekuatan politik (dibahas di BAB berikutnya), Group Bakrie juga melakukan 'jurus penyelamatan' termasuk dengan menjual saham-sahamnya:

Namun usaha ini tercatat mendapatkan kecaman dari Bapepam dan menteri

keuangan pada saat itu yaitu; Sri Mulyani. Beberapa strategi taktis terkait kepemilikan saham adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Syailendra Surmansyah Bakrie (putra Indra Usmansyah Bakrie) menjual semua sahamnya di Federal Internasional Ltd.
2. PT Energi Mega Persada sepakat melepas dua induk lapindo brantas Inc (kalila energi ltd. dan Pan Enterprise asia ltd.

Bakrie mengklaim hal ini dilakukan untuk menyelamatkan PT Energi Mega sebagai perusahaan publik dan Bakrie tetap menanggung biaya bencana lapindo lewat perusahaan afiliasi namun hal ini mendapatkan hambatan dari Bapapam (badan pengawas pasar modal) mengenai kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab atas bencana lapindo setelah penjualan.

3. PT Energi Mega menandatangani perjanjian jual beli dua induk lapindo Brantas. Langkah Bakrie ini mendapatkan kecaman juga dari menteri keuangan Sri Mulyani dengan alasan belum ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas bencana lapindo. Sikap Sri Mulyani ini serupa dengan Bappepam.
4. Group Bakrie menawarkan pembelian penyertaan modal Medco dan Santos di Blok Brantas. Salah satu tujuannya disinyalir untuk menyelesaikan gugatan medco dan memuluskan langkah Bakrie

## **BAB III**

### **POLA HEGEMONI KORPORATISME INTEREST GROUP BAKRIE**

Hegemoni bukan hanya milik Negara, tetapi bisa juga dilakukan oleh kelompok kepentingan. Pada BAB sebelumnya, hegemoni yang dijelaskan oleh Gramsci telah menyusuri hubungan Negara dengan dominasi kelompok kepentingan yang menjadi karakteristik hegemoni, termasuk dalam menyusun suatu kebijakan. Dalam kasus lapindo, Negara yang kemudian diintervensi oleh group Bakrie telah membawa kasus ini terkatung-katung selama 4 tahun. Janji Pihak PT. Minarak Lapindo untuk mengganti rugi korban lapindo masih belum terealisasi sepenuhnya.

#### **A. Lobby Jalur Hukum**

Hegemoni yang dilancarkan oleh group Bakrie bukan hanya dalam menguasai perekonomian tetapi lebih dari itu juga dengan menyebarkan ideologi bencana alam pada kasus semburan Lumpur Lapindo. Sudah 4 tahun sejak 26 Mei 2006, namun kasus Lapindo belum menemukan titik cerahnya. Sampai sekarang, lumpur lapindo masih aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap hari. Hal ini telah mengakibatkan kelumpuhan bagi 19 desa dari 3 kecamatan yaitu Porong, Jabon, dan Tanggul Angin: 14.000 keluarga kehilangan kehidupan normal mereka, 33 sekolah tenggelam dan enam pesantren tutup. Korban meninggal akibat ledakan gas pertamina sebanyak 15 orang.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup><http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/30/bakrie-award-2010-ditolak-dan-peminatannya-12>

Putusan hukum yang dijatuhkan untuk kasus semburan lumpur lapindo pun sangat menguntungkan pihak Bakrie. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada PT, Minarak Lapindo serta pemerintah. Gugatan ini kemudian ditolak Pengadilan Negeri Jakarta dengan alasan bahwa semburan Lapindo terjadi karena bencana alam. Begitu juga dengan gugatan dari YLBHI yang kandas di tengah jalan. Pada awalnya, hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa kesalahan ada pada pihak Lapindo, namun keputusan tersebut dianulir oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.

Keganjilan hukum ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Surat penghentian penyelidikan (SP3) pada masa Kapolda Anton Bahrul Alam, padahal pada masa Kapolda sebelumnya yaitu Herman S. Sumawireja menyatakan Lapindo adalah pihak yang bersalah dengan menetapkan 13 tersangka. Subagyo, advokat yang sekaligus Tim Investigasi Komnas HAM dalam kasus Lapindo bahkan menyatakan bahwa di-SP3-kannya kasus Lapindo merupakan jual beli hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan cara menekan kejaksaan. Dalam kasus ini, pihak kejaksaan dikontrol agar tidak mempidanakan kasus Lapindo dilapangan dengan cara pengembalian berkas kasus kepada pihak Polda Jatim secara berulang-ulang dengan petunjuk yang berubah-ubah.<sup>67</sup>

Adanya penutupan kasus Lapindo pada tahun 2009 adalah implikasi dari ambiguitas keputusan presiden yang inkosisten dalam mengatasi kasus Lapindo. Dalam Kepres No 13 tahun 2006, disebutkan bahwasanya pemerintah

membebaskan seluruh kerugian akibat lumpur lapindo kepada pihak PT. Lapindo Brantas. Namun pada revisi Kepres No 14 tahun 2007, ganti rugi berubah menjadi akad jual beli dan tanggung jawabnya tidak semata-mata pada pihak PT. Lapindo tetapi juga pada APBN. Data mencatat, sampai akhir 2009 sekitar 4 Trilyun uang negara (APBN) tersedot oleh kasus Lapindo.<sup>68</sup>

Agenda politik yang menghendaki pembentukan pansus lapindo timbul tenggelam dengan fakta ditolaknya usulan tersebut oleh satu fraksi saja yaitu Golkar. Sampai tanggal 16 Agustus 2010, sudah ada 55 anggota dewan DPRD yang menandatangani dukungan pembentukan pansus.<sup>69</sup> Pansus serupa sebenarnya sudah pernah terbentuk pada tahun 2004 dengan inisiator salah satu anggota fraksi PPP. Namun pansus ini kemudian berakhir dengan masa tugas tanpa hasil yang jelas bagi para kepentingan korban, sehingga usulan pembentukan pansus jilid II pun banyak diragukan publik.<sup>70</sup>

Ketua umum Fraksi Golkar, Aburizal Bakrie menanggapi pembentukan pansus jilid II dengan santai. Politisi sekaligus ketua Seketariat gabungan ini menyatakan bahwa keputusan hukum tentang kasus lapindo bukanlah urusan DPR tetapi sudah menjadi wewenang mahkamah Agung.<sup>71</sup> Pernyataan “santai”

---

<sup>68</sup> Subagyo, “Lumpur Lapindo dan hukum usang” dalam opini KOMPAS 31 Mei 2010

<sup>69</sup> Surabaya Antara News, 17 Agustus 2010  
<<http://www.antaranews.com/berita/1282028224/fraksi-golkar-tolak-pansus-lapindo>> diunduh tanggal 20 Agustus 2010

<sup>70</sup> Rohman Taufiq, 12 Agustus 2010  
<<http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/08/12/brk.20100812-270798.id.html>> diunduh tanggal 20 Agustus 2010

<sup>71</sup> Kompas.com “Ical tak Keberatan Usul lapindo” 12 Agustus 2010  
<<http://nasional.kompas.com/read/2010/08/12/brk.20100812-270798.id.html>>



Aburizal Bakrie bisa dimaklumi jika melihat keputusan hukum Lapindo yang banyak menguntungkan pihak Abu Rizal Bakrie.

Kasus Lapindo ini mencuatkan banyak asumsi publik mengenai kelumpuhan hukum yang ditanggung oleh group Bakrie. Sebenarnya untuk membuktikan apakah Lapindo murni bencana alam atau murni kesalahan Lapindo, Sallahuddin Wahid meninjau dari 3 aspek yaitu keteknikan, hukum dan politik:

Dari aspek ketekhnisan, sebagian besar insinyur ketekhnisan menyatakan bahwa kasus bocornya Lapindo adalah teknis di lapangan. Fakta ini didukung oleh insinyur pengeboran internasional di Capetown pada tahun 2008 yang lalu. Para geolog dunia dalam pertemuan American Association of Petroleum Geologi ini memasukkan tema khusus kejadian semburan lapindo di Indonesia. Dari 74 peserta; 42 pakar menyatakan bencana Lapindo akibat kelalaian dalam pengeboran. Sedangkan 16 ilmuwan belum memberikan pendapat. Adapun 13 ilmuwan lainnya menyatakan penyebabnya adalah campuran antara pengeboran dan gempa bumi. Ditambah lagi dengan data yang diaudit BPK berupa dokumen rahasia Medco yang bocor ke publik. Dokumen kepemilikan mitra lapindo dalam eksplorasi blok Brantas ini mengungkapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo adalah kesalahan terkait aktifitas pemboran Sidoarjo.<sup>72</sup> Berbeda dengan ahli geologi di Indonesia yang malah menyatakan bahwa peristiwa ini adalah dampak dari gempa bumi di kawasan Yogyakarta. Dalam menganalisa kasus ketekhnisan

---

<sup>72</sup> = ...

ini; ada satu fakta bahwa belum pernah ada pertemuan ilmiah antara kedua kelompok tersebut untuk beradu argumentasi.<sup>73</sup>

## **B. Pembentukan Sekertariat Gabungan**

Kenyataan bahwa kasus Lapindo menjadi bias dimata hukum sehingga mengorbankan ribuan nyawa rakyat Sidoarjo adalah dampak dari hegemoni yang dilancarkan oleh pemilik pemilik group Bakrie, Aburizal Bakrie dengan memperjual-belikan hukum. Tentu saja hal tersebut tidak akan mampu dilakukan sembarang orang yang tidak berpengaruh di Negara ini. Modal kapital yang besar bukan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan kepemimpinan kultural seperti yang dikatakan Gramsci. Perlu metode lain yang lebih strategis sehingga kepentingan yang dikehendaki bisa digoal-kan. Termasuk mempengaruhi *police maker*. Ada beberapa pola yang digunakan Aburizal Bakrie dalam menyebarkan ideologinya; terutama menjadikan kasus lapindo sebagai bencana alam; sehingga sebagian anggaran APBN banyak disedot untuk mengganti rugi korban lumpur Lapindo.

Aburizal Bakrie sebagai komisaris utama di Bakrie group adalah seorang pengusaha kaya yang dinobatkan menjadi orang terkaya se-ASIA versi majalah Forbes Asia pada tahun 2007. Dengan perjalanan kariernya yang pernah menjabat sebagai Menteri perekonomian rakyat di Kabinet Indonesia bersatu, Aburizal Bakrie sekarang adalah Ketua Umum partai Golkar yang merangkap sebagai ketua umum Sekertariat gabungan. Kabar terbaru dari politisi ini adalah niatannya untuk maju ke Pilpres 2014. Cita-cita Aburizal Bakrie untuk maju ke arena

---

<sup>73</sup> Salahudin Wahid "Data lumpur Lapindo" dalam opini KOMPAS.com, 12011, 08010

pemilihan Presiden tahun 2014 sudah dibarengi dari peneitraan diri, termasuk bagaimana membersihkan namanya dari kasus Lapindo.

Posisi Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai Ketua Sekretariat Gabungan menjadi strategis dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudiyono saat ini. Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah koalisi sejumlah parpol pendukung SBY yang dibentuk di Puri Cikeas, Bogor pada Kamis malam tanggal 6 Mei 2010 di bawah pimpinan langsung Presiden SBY. Pada kesempatan itu, terpilih ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie sebagai ketua harian, dan Syarif Hasan sebagai sekretaris. Pembentukan Setgab ini dimaksudkan Aburizal Bakrie sebagai wadah untuk membicarakan masalah-masalah krusial seperti penyusunan UU APBNP dan kepala Kapolri.

Keberadaan Setgab ini tidak lepas dari isu politik sebelumnya yang mengakibatkan Sri Mulyani lengser akibat kasus Century. Bahkan keberadaan Aburizal Bakrie sebagai ketua Setgab telah berhasil membuat kasus Century tenggelam. Kritikan pembentukan Setgab datang dari salah satu anggota partai PDIP; Ganjar Pranowo yang menilai bahwa Setgab adalah praktek dari politik transaksional elite dan keterlisasi yang tidak memperhatikan rakyat. Menurutnya, pembentukan setgab akan menimbulkan keterlisasi politik di mana pemerintah (penguasa) akan mengamankan segala kebijakan-kebijakannya, terutama Aburizal Bakrie yang menjadi Ketua Umum koalisi ini. Masih dari fraksi yang sama (PDIP), Arief Budimanta menilai bahwa Setgab adalah hegemoni baru kroni kapitalisme di era reformasi yang sebelumnya pernah terjadi di era Soeharto.

Hegemoni Golkar pada zaman Orde Baru terlahir kembali melalui wajah setgab di

mana dikotomi kekuatan oposan dan koalisi merepresentasikan kekuatan kutub pro rakyat ataupun pro penguasa. Akibatnya, akan ada banyak produk kebijakan yang menguntungkan para penguasa.<sup>74</sup>

Seorang peneliti hukum *corruption watch*, Donald Fariz menyebutkan bahwa dengan dibentuknya sekretariat gabungan yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, telah memberikan banyak porsi kekuasaan seperti penyandraan hukum dalam jangka waktu panjang.<sup>75</sup> Setgab adalah pemecah ombak kelompok oposan yang mengancam keberadaan Susilo Bambang Yudiyono. Tawar menawar kekuasaan (*political bargaining*) menjadikan Golkar di bawah Pimpinan Aburizal Bakrie memutar haluan menjadi partai koalisi pemerintah, sehingga sekarang berada satu gerbong kereta dengan pemerintah.

Jabatan sebagai ketua sekretariat gabungan menurut pengamat hukum ini telah memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar, sehingga mampu merapikan barisan koalisi di parlemen. Aburizal Bakrie adalah the *invisible hand* (tangan tak tampak) untuk menyeiramakan suara parlemen yang terdengar 'sumbang' terhadap pemerintah. Politik kartel semacam ini merupakan sistem yang terbentuk dari koalisi elit politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, baik dalam pemilu atau dalam koalisi. Sistem Kartel ini lebih mengutamakan mekanisme perangkulan dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam sistem kartel, dorongan berpartisipasi kabinet dan

---

<sup>74</sup> Muchtar Effendi Harahap; "Menyoal Setgab parpol Koalisi dan oposisi politik" [http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2010\\_06\\_01\\_archive.html](http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2010_06_01_archive.html) di akses pada tanggal 30 mei 2010

<sup>75</sup> Donald Fariz "Tanggapan Kadal Century", dalam OPINI KOMPAR, 31 Mei 2010

struktur kepemimpinan di Komisi misal karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Sependapat dengan Donal fariz, posisi Aburizal Bakrie sebagai ketua Setgab menurut Salahudin Wahid sangat startegis dalam menanggulangi kasus lapindo yang menjeratnya. Dengan posisi tawarnya, Aburizal Bakrie mampu menyandera penegakan hukum di negara ini. Salah satunya adalah dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) perihal peristiwa semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Seperti dijelaskan di atas, selain dengan mendekati para ilmuwan geolog dengan mewacanakan semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam, Aburizal Bakrie juga berhasil mewacanakan "kemurahan hati mereka" dalam membantu korban dengan mengeluarkan dana sebanyak 5 Trilyun.

Selain memutuskan status Lapindo sebagai bencana alam, anggota dewan juga lebih memilih menjadikan kawasan Sidorajo sebagai kawasan wisata Geologi daripada menanggulangnya. Menurut anggota dewan, wakil komisi V DPR, Yoseph Umar Hadi kasus Lapindo lebih baik dibiarkan karena akan menguras banyak biaya.<sup>76</sup> Pemerintah telah menyiapkan dana setidaknya 273 Milyar untuk merelaisasikan pembangunan objek wisata Geologi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini diakui oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang menyatakan proyek ini akan dimulai pada tahun 2011.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> <http://surabaya.detik.com/read/2010/05/11/193020/1355546/475/anggota-dpr-ri-minta-semburan-lumpur-lapindo-dibiarkan> di unduh tanggal 21 Agustus 2010

<sup>77</sup> Surabaya, Anantara Pos <http://www.antaraneews.com/berita/1275062877/pemerintah-siapkan-rp273-miliar-untuk-wisata-lapindo> di unduh pada tanggal 21 Agustus 2010

### **C. Pendekatan Struktur Keagamaan.**

Hegemoni dalam analisa Gramsci mengisyaratkan adanya kepemimpinan moral dan intelektual sebagai alat untuk menguasai, sebagai jalan untuk menginternaslisasikan nilai-nilai serta norma atas subordinasi kelompok tersebut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang mencakup media massa, sekolah, gereja (lembaga keagamaan). Peran yang dipegang oleh apparatus tersebut sangat signifikan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat. Terlebih lagi jika menyangkut urusan agama, Gramsci menilai bahwasanya oraganisasi keagamaan memiliki otonomi yang besar dari Negara dalam banyak formasi sosial. Dalam hal ini; agama dikonsepsikan oleh Gramsci sebagai suatu sistem nilai moral; sistem kepercayaan maupun moral politik.<sup>78</sup>

Menurut Gramsci, agama dan akal sehat tidak dapat membentuk suatu tatanan intelektual; karenanya keduanya tidak dapat direduksi menjadi kesatuan koherensi bahkan dalam suatu kesadaran individual maupun kolektif, atau bahkan sebaliknya keduanya tidak dapat direduksi secara bebas-karena dapat dilakukan secara otoritarian; meksipun memang dalam batas-batas yang dilakukan pada masa lalu.

Selain pemerintah yang merespon bencana ini, kompleksitas yang diakibatkan oleh bencana Lumpur Sidoarjo juga melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok sosial masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Salah satu kelompok dari masyarakat yang keberadaannya diperlukan dalam penanganan dampak dari Sidoarjo adalah

---

<sup>78</sup> Robert Boccok.,op.cit., hal 124

komunitas keagamaan. Hal ini menjadi sangat signifikan mengingat masyarakat daerah Sidoarjo memiliki basis nilai keagamaan yang kuat. Berdasarkan catatan, tempat keagamaan yang menjadi koban sampai Mei 2007 mencapai 65 buah, sementara sekolah keagamaan (madrasah/pesantren) mencapai 28 buah dengan total santri sejumlah 2701 orang dan guru agama sebanyak 198 orang.<sup>79</sup> Keberadaan komunitas keagamaan yang besar secara kuantitas ini yang kemudian akan dibaca melalui perspektif Gramsci, melalui pola apa saja hegemoni disebar. Ada dua organisasi keagamaan yang akan dibaca, yaitu NU Porong dan Muhammadiyah Porong.

### **6.1 NU Porong**

NU porong adalah komunitas sosial keagamaan terbesar di Porong. Secara umum, NU di Porong memberikan dua respon yaitu berupa respon sosial dan respon keagamaan. Respon sosial dilakukan dengan mendirikan posko bantuan, misalnya posko pengungsian, namun posko ini menghentikan operasi sumbangannya sejak ada isu kucuran ganti rugi 20% korban Lumpur. Sedangkan respon keagamaan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan massal, seperti istighasah, pengajian ataupun dzikir bagi korban Lumpur.

Sejak isu ganti rugi terhadap korban bencana Lapindo bergulir, komunitas keagamaan NU tidak terlepas dari isu makelarisasi ganti rugi. Urusan makelarisasi ini sangat sensitif bagi korban bencana Lapindo karena bisa menimbulkan konflik kepentingan. Tokoh budayawan sekaligus agamawan, Emha

Ainun Najib-pun tidak terlepas dari tuduhan makelarisasi ini.<sup>80</sup> Isu makelarisasi ini menghinggapi beberapa oknum NU yang dianggap menggunakan nama NU untuk mendapatkan 'proyek' dari bencana Lapindo.

NU sendiri memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu bencana Lapindo. Pertama yang menganggap bencana ini sebagai takdir Allah SWT, yang kedua sebagai kesalahan manusia (*human error*), yang ketiga menganggap bencana ini sebagai kombinasi takdir dan kesalahan manusia. Ketiga pendapat ini memiliki kesamaan dalam memandang bencana ini berkaitan dengan faktor Tuhan, selain akibat kesalahan manusia.

Isu mengenai 'takdir' Tuhan ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi pihak Lapindo dalam mengatasi penanggulangan korban bencana, apalagi sejak diputuskan dalam Kepres no 14 tahun 2007. Status penamaan semburan Lumpur Lapindo sebagai bencana alam (takdir) disebar oleh tokoh agama sehingga akan menguntungkan pihak PT. Lapindo brantas.

## **C.2 Muhammadiyah Porong**

Seperti halnya NU, organisasi Muhammadiyah juga sangat responsif dalam menanggulangi semburan Lumpur Lapindo. Respon yang dilakukan hampir sama yaitu berupa respon sosial maupun respon keagamaan. Muhammadiyah Porong memberikan bantuan langsung dengan menyelenggarakan *event-event* pembagian bantuan tanpa membuat posko. Kegiatan keagamaan yang dibuat oleh Muhammadiyah Porong tidak seperti NU yang menyelenggarakan kegiatan



keagamaan yang bersifat massal. Muhammadiyah Porong hanya melakukan pendekatan personal kepada warga Muhammadiyah yang terkena musibah.

Pandangan teologis dari kalangan Muhammadiyah terhadap bencana Lapindo cenderung seragam. Mereka menganggap bahwa bencana lapindo diakibatkan oleh kesalahan manusia.

### **C.3 Analisa Komparatif Hegemoni diantara NU dan Muhammadiyah**

Bagi Gramsci, kelompok agama digolongkan ke dalam kelompok masyarakat sipil di mana terjadi perjuangan politik diantara sesama kelompok agama, pemilik modal, serikat dagang maupun partai politik. Menurutnya, kelompok keagamaan bisa menjadi kelas hegemoni karena lewat organisasi keagamaan ini terjadi perjuangan politik dan ideologis.

Teori Gramsci ini bisa dilihat dari kelompok NU yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah Porong. Sebagian Kyai NU ini memiliki inisiatif membawa masalah Lumpur ini menjadi bencana nasional. Meskipun inisiatif ini tidak terlaksana, namun inisiatif tersebut menunjukkan pola fikir sebagian kyai NU yang lebih condong kepada tindakan kooperatif dengan pemerintah. Respon demikian dinilai Pengurus NU lebih startegis karena NU kehilangan banyak asset akibat bencana. Adalah satu kenyataan jika memang NU Porong jauh lebih banyak kehilangan asset daripada Muhammadiyah. Oleh karena itu, NU Porong berupaya mencari ganti rugi aset yang hilang tersebut berbekal sertifikat.

Pandangan teologis yang menilai bahwa bencana adalah takdir dan diakibatkan oleh faktor Tuhan, (*bencana lapindo sudah tertulis di zaman Azzali*)

banyak diadopsi oleh kalangan NU dan Muhammadiyah karena itu selaras dengan

ditawaran pun selaras dengan doktrin ajaran yaitu *mengimani dan kembali ke jalan Tuhan*. Pandangan deterministik ini lebih di dominasi oleh kalangan elit Kyai NU daripada Muhammadiyah dikarenakan NU lebih terpengaruh oleh kitab kuning klasik. Dengan mainstream berfikir seperti ini, dan respon keagamaan seperti Istighasah, dzikir bersama maka NU menjadi bagian dari kelompok penguasa yang telah mempraktikan dan menyebarkan hegemoni di kalangan masyarakat Sidoarjo jika dirunut dengan kacamata Gramsci.

Keterlibatan basis NU lainnya bisa dianalisa dari hal yang dilakukan Aburizal Bakrie adalah dengan melakukan melakukan safari ke sejumlah pesantren (ponpes). Pada tanggal 26 Agustus 2010, Aburizal Bakrie mendatangi Ponpes lirboyo. Pada kesempatan tersebut, Aburizal Bakrie di depan Pimpinan dan santre Lirboyo menjelaskan bahwasanya kejadian tragis yang menimpa warga Sidoarjo adalah murni bencana alam dan bukan kesalahan dari perusahaan. Selain itu, Aburizal Bakrie juga mengungkapkan, tak benar jika lapindo memberi kompensasi yang tak layak kepada korban. Menurutnya, lapindo sudah membeli tanah warga dengan harga dua puluh kali lipat dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dengan persyaratan bahwa tanah tersebut haruslah yang benar-benar bersertifikat. Acara 'sowan' ini pun tidak berhenti di ponpes lirboyo saja tetapi dilanjutkan dengan mengunjungi lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) di Burengan .<sup>81</sup>

#### **D. Pembungkaman Intelektual Organik; Bakrie Award**

Dalam pandangan Gramsci, kepemimpinan intelektual dan filosofis harus secara aktif diproduksi, karena hegemoni dapat dibentuk melalui beberapa

---

<sup>81</sup> Lihat Radar Yogya, edisi 27 Agustus 2010, "Ical Klarifikasi Lapindo di Lirboyo"

keadaan dalam masyarakat sipil bahkan jika bukan dalam konteks perekonomian: Gramsci bahkan membahas peran intelektualisme dalam masyarakat sipil. Setidaknya ada tema yang menjadi bahasan Gramsci terhadap intelektual. Pertama adalah perlunya menghapus perbedaan kerja manual dan kerja intelektual yang telah berlangsung di bawah kapitalisme dalam produksi, dalam masyarakat sipil dan aparatus Negara. Kedua adalah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang akan menjadi dasar analisa dari pemberian Bakrie award, terkait pemikiran Gramsci mengenai watak kekuasaan yang lahir dari akibat monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa.

Gramsci tidak mengembangkan teori intelektual yang komperensif tetapi dia melakukan sejumlah observasi terhadap mereka dalam masyarakat serta hubungannya dengan gerakan buruh dan partai revolusioner. Intelektual bagi Gramsci bukan dieirikan oleh aktifitas instrintik yang dimiliki oleh semua orang namun oleh fungsi yang mereka jalankan. Definisi intelektual menurut Gramsci adalah semua orang yang mempunyai fungsi sebagai organisator dalam semua lapisan masyarakat, dalam wilayah produksi sebagaimana dalam wilayah politik dan kebudayaan. Bagi Gramsci ada satu pandangan umum yang dia kritisi terhadap intelektual di mana menurutnya mereka bukan hanya pemikir, penulis, dan seniman tetapi organisator seperti pegawai negeri dan pemimpin politik. Mereka tidak hanya berguna dalam masyarakat sipil dan Negara tetapi juga dalam alat produksi seperti ahli mesin, manajer, dan sebagainya.

Gramsci membagi intelektual menjadi dua jenis, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional. Menurut dia, intelektual organik adalah mereka yang





dikirim melalui jaringan dunia maya menyerukan pengembalian Bakrie Award kepada para pihak yang sebelumnya telah menerima Bakrie Awards. Miling ini dikirim melalui [bencana@googlegroups.com](mailto:bencana@googlegroups.com) ke milis bencana, milis elshinta, milis jurnalisme; milis lingkungan; dll. Dalam miling list ini diserukan kepada para penerima Bakrie award mengenai penderitaan yang diakibatkan oleh Aburizal Bakrie karena tidak bertanggung jawab penuh atas kejadian semburan lumpur di Sidoarjo:

#### **E. Pembentukan Opini Media**

Untuk menyebarkan suatu kebenaran ataupun berita terhadap individu lain seseorang membutuhkan media. Media ini tidak hanya berperan sebatas penyampaian fakta. Realitas media adalah serangkaian fakta yang dipilih, diseleksi dan dibingkai sedemikian rupa untuk menghadirkan suatu rangkaian imaji yang utuh; tentang suatu peristiwa pada saat yang bersamaan realitas media merupakan usaha yang menyampaikan salah satu versi kebenaran tentang peristiwa, yang karena keterbatasan ruang dan waktu dan juga kepentingan politik tertentu terpaksa mengabaikan versi kebenaran yang lain.<sup>87</sup>

Dalam level produksi berita seringkali dipusatkan pada proses pembentukan berita (newsroom). Newsroom bukan ruang hampa, netral, atau menyalurkan informasi apa adanya sesuai fakta lapangan. Proses pembentukan berita adalah proses yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, seperti yang di kutip oleh Agus Sudiby, mengidentifikasi lima

faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi.<sup>88</sup> Pertama, faktor individual. Kedua, level rutinitas media. Ketiga, level organisasi. Keempat, level ekstra media. Pada level keempat ini sedikit banyak mempengaruhi pemberitaan di media: Faktor ekstra level ini adalah:

- a. Sumber berita. Sumber berita dipandang bukanlah pihak yang netral dalam memberikan informasi yang apa adanya, ia juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan, seperti memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak sebagai pihak yang memiliki kepentingan maka tentu saja sumber berita memberlakukan politik pemberitaan:
- b. Sumber penghasilan media. Sumber penghasilan media ini bisa berupa iklan, bisa juga berupa pelanggan atau pembeli media. Untuk dapat bertahan hidup kadangkala media berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi mereka. Pihak pengiklan memiliki strategi untuk memaksakan kepentingannya kepada media, termasuk memaksa media untuk mengembargo berita buruk mengenai mereka.
- c. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Pemerintah dalam banyak hal memegang lesensi penerbitan, dan untuk tetap terbit maka media tersebut harus mengikuti batas-batas yang telah ditentukan.

- d. Level ideologi: Diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

### **1. Propaganda Surat Kabar**

Pada kasus Lapindo analisa wacana dilakukan terhadap teks media alternatif sebagai respon atas kasus Lapindo. Aburizal Bakrie adalah pengusaha yang kaya di mana dia mampu membeli sejumlah media untuk menyebarkan hegemoninya bahwa semburan lumpur Lapindo adalah bencana alam bukan bencana akibat kesalahan teknis pengeboran. Bahkan Aburizal Bakrie melakukan rekayasa kuasa pada menamaan peristiwa ini. Beberapa surat kabar merujuk nama lokasi, seperti "Lumpur Porong" (Porong : adalah nama kecamatan ) atau Lumpur Sidoarjo (Sidoarjo adalah nama kabupaten). Beberapa media internasional seperti National Geographic atau Nature menggunakan istilah "Lumpur Sidoarjo" atau disingkat Lusi. Namun secara spontan beberapa pekerja media menggunakan istilah Lapindo dalam wacana sehari-hari meskipun tulisannya tidak menggunakan istilah ini.

Dilema penamaan media diatas atas peristiwa semburan lumpur ini ditemukan Suryandaru dalam riset yang dilakukan atas tiga media nasional yaitu Kompas, Media Indonesia dan Seputar Indonesia. Selain itu, dia juga menambahkan tiga media lokal yaitu Jawa Pos, Surya, dan Surabaya Pos. Menurut Suryandaru ada surat kabar yang secara konsisten menggunakan istilah



Sementara beberapa surat kabar lain memiliki kecenderungan yang inkonsisten dalam pemberian label pada peristiwa ini. Beberapa nama muncul dalam pemberitaan media dalam kelompok terakhir tadi mulai dari “Lumpur Lapindo”; “Lumpur Sidoarjo”; sampai hanya dengan menyebutnya Lumpur tanpa embel-embel apapun. Bagi Suryandaru nama “Lumpur Lapindo” berkonotasi menghakimi Lapindo Brantas sebagai pihak yang bertanggungjawab atas luapan lumpur. Sementara penamaan “Lumpur Porong” atau “Lumpur Sidoarjo” lebih berkonotasi netral tidak menuduh ataupun menyalahkan siapa yang menjadi penyebab semburan lumpur.<sup>89</sup>

Aburizal Bakrie adalah pengusaha yang memiliki banyak usaha; dengan modal yang dia miliki maka bukanlah suatu hal yang sulit untuk mengontrol opini publik lewat kontruksi realitas media massa. Lapindo bahkan menawari media massa di Surabaya untuk menerima satu Milyar rupiah untuk setiap pendekatan komersial yang mendukung kepentingan mereka.<sup>90</sup> Harian Surya adalah surat kabar lokal Surabaya yang mengambil tawaran iklan Lapindo. Lapindo membeli satu halaman penuh Harian Surya untuk advertorial selama satu bulan penuh. Meskipun Advertorial ini diterbitkan satu halaman penuh selama enam bulan berturut-turut, Harian Surya masih mengklaim independen terhadap pemberitaan mereka terkait Lapindo.

Selain Harian Surya, Bakrie group juga membeli saham Harian Surabaya Post, yang keberadaannya hampir saja kolaps. Dhimam Abroer yang merupakan

---

<sup>89</sup> Ibid halaman 4

<sup>90</sup> Hasil Penelitian: *Antara Nelayan dan Pengusaha* oleh Dhimam Abroer

pimpinan Redaksi Surya Post mengambil kebijakan redaksional dengan tidak memberitakan kasus semburan Lumpur lapindo. Pilihan ini dibuat Dhimam Abroer berdasarkan pertimbangan kondisi redaksi Surabaya Post yang sedang membutuhkan rehabilitasi finansial:

## **2. Propaganda TV**

Aburizal Bakrie merupakan pemilik 2 stasiun TV yaitu ANTV dan TV one. Pada sebuah wawancara yang disiarkan oleh ANTV tertanggal 5 April 2009; Aburizal Bakri mengakui bahwa Lapindo hanyalah salah satu perusahaan kecil dibanding oleh perusahaan lainnya, tapi lumpur Lapindo telah mengakibatkan masalah besar. Menurutnya; tidak ada ganti rugi; yang ada adalah transaksi jual beli antara penduduk Lapindo sebagai penjual dan pihak Lapindo sebagai pembeli sesuai dengan Perpres no 14 tahun 2007 pasal 15. Menurut Aburizal Bakrie, semburan Lumpur lapindo terjadi karena gempa bumi Yogyakarta sehingga Lapindo tidak harus bertanggung jawab. Bakrie menggunakan hasil sidang pengadilan negeri Jakarta tertanggal 22 Januari 2008 sebagai dasar argumennya. Oleh karena kejadian semburan alam merupakan bencana alam; maka PT: Lapindo Brantas menurutnya merupakan bagian sama dari korban.

Untuk membentuk asumsi publik bahwasanya kasus semburan lapindo adalah bencana alam; Aburizal Bakrie sering menayangkan running teks di tayangan berita yang di putar TV One. Salah satunya adalah tertanggal 1 Oktobet 2010. Pada running teks yang menyertai berita petang, disebutkan bahwasanya